

# LAB 45 — TELAAH KEBIJAKAN

No. 006 - 4 Mei 2025

*Telaah Kebijakan LAB 45 adalah wadah yang dirancang untuk menyampaikan pandangan kritis dan analisis terkini dari para peneliti serta analisis kebijakan terkait berbagai isu strategis seputar politik keamanan, ekonomi politik, politik media, dan gender. Platform ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam sekaligus menawarkan gagasan inovatif dalam menghadapi tantangan lokal ataupun global. Pendapat yang tercantum dalam setiap komentar merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak merefleksikan posisi resmi LAB 45. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim kami melalui [lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id).*



## Erosi Hegemoni

*Transisi Kekuasaan: Akankah AS Tersungkur?*

Sejarah berdetak seperti jam tua, tak pernah abadi. Kekuasaan naik ke panggung dunia, menari, lalu meredup. Spanyol, di abad ke-16, menjulang di bawah Raja Carlos I (1516–1556) dan Raja Felipe II (1556–1598), yang memerintah imperium luas dari Amerika hingga Eropa, didorong oleh emas kolonial dan armada tak tertandingi, namun akhirnya memudar akibat perang dan kebangkrutan.

Belanda, di abad ke-17, bersinar dalam “Zaman Emas” di bawah Republik Tujuh Provinsi, dipimpin oleh Stadhouders Willem II (1647–1650) dan kemudian Johan de Witt (1653–1672 sebagai Grand Pensionary, pemimpin *de facto*), menguasai perdagangan global melalui VOC, sebelum terkikis oleh persaingan Inggris dan Prancis. Inggris, di abad ke-19, memerintah lautan di bawah Ratu Victoria (1837–1901), dengan Imperium Britania mencakup seperempat bumi selama Pax Britannica, namun meredup pasca-Perang Dunia II.

Kini, Amerika Serikat (AS), yang menjulang pasca-Perang Dunia II, berdiri di tepi jurang. Di hadapannya, Tiongkok melangkah, bukan dengan dogma Barat, melainkan dengan jaringan digital dan lompatan teknologi pasca-kuantum, menawarkan konektivitas tanpa utopia. Pertanyaannya bukan apakah hegemoni AS akan runtuh, tetapi kapan—dan bagaimana bayang-bayang kiamat geopolitik, bak empat penunggang kuda dalam Kitab Wahyu, akan mewarnai akhirnya.

Dalam Kitab Wahyu, empat penunggang kuda muncul sebagai pengantar kiamat: penaklukan berkuda putih, perang berkuda merah, kelaparan berkuda hitam, dan kematian berkuda hijau pucat. Warna-warna ini—putih, merah, hitam, hijau pucat—menggambarkan kekuatan yang menghancurkan tatanan. Sejarah dunia mencerminkan bayang-bayang mereka, dan di panggung modern, persaingan AS-Tiongkok membawa gema serupa. Mencegah kiamat geopolitik ini butuh diplomasi yang tak sekadar jargon, reformasi institusi yang tak cuma kosmetik, dan pengendalian



**Andi Widjanto**  
Penasihat Senior,  
Laboratorium Indonesia  
2045

teknologi agar tak jadi pisau bermata dua.

### *Empat Penunggang dalam Sejarah Dunia*

Sejarah adalah cermin kelam, di mana warna-warna empat penunggang kuda berkali-kali menjelma. Warna putih, lambang ambisi penaklukan, kuasa yang menyapu batas-batas, pernah hidup dalam ekspansi Mongol abad ke-13. Di bawah Genghis Khan, Mongol menaklukkan Asia hingga Eropa Timur dengan kecepatan kilat, menyatukan wilayah luas melalui kekuatan militer. Dari stepa Mongolia hingga Laut Kaspia, mereka menguasai sepertiga dunia dalam beberapa dekade, menciptakan Pax Mongolica yang rapuh. Namun, penaklukan gemilang ini membawa kehancuran kota dan peradaban, sebelum akhirnya retak oleh perebutan kekuasaan internal.

Awas ada merah! Warna darah, simbol perang yang membakar, yang mewujud dalam Perang Dunia I, antara 1914 hingga 1918. Persaingan imperial antara Inggris, Jerman, Rusia, menyeret dunia ke dalam konflik yang menewaskan 16 juta jiwa. Parit-parit di Somme dan Verdun menjadi kuburan massal, lahir dari ambisi geopolitik dan aliansi rapuh, menghancurkan nyawa, meruntuhkan monarki, dan mengguncang tatanan global hingga membuka jalan bagi ketidakstabilan abad ke-20.

Hitam, warna kelaparan, ketika bumi menolak memberi, menjelma dalam Krisis Pangan Bengal 1943. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, hingga 3 juta orang di Bengal, India, tewas. Kebijakan pengalihan beras untuk kebutuhan perang dan kelalaian administrasi memperparah krisis, mengubah sawah-sawah hijau menjadi kuburan, sementara dunia sibuk dengan Perang Dunia II—bukan sekadar bencana alam, tetapi cermin ketimpangan dan ketidakpedulian kekuasaan.

Akhirnya, hijau pucat, warna kematian yang merayap, tak memandang batas, hadir dalam Pandemi Flu Spanyol 1918. Di tengah kekacauan pasca-Perang Dunia I, virus ini menyebar cepat, merenggut 50 juta nyawa di seluruh dunia—lebih banyak daripada korban perang itu sendiri. Dari kota-kota Eropa hingga desa-desa Asia, kematian datang tanpa peringatan, memperlihatkan kerapuhan peradaban di hadapan ancaman tak terlihat, mengingatkan bahwa kematian tak selalu lahir dari pedang, tetapi bisa dari udara yang kita hirup.

Di panggung modern, keempat warna ini mengintai, terwujud dalam kebijakan global AS sejak Perang Dunia II. Penaklukan putih berkobar melalui Doktrin Truman 1947, yang menggelontorkan miliaran dolar melalui Rencana Marshall untuk membangun Eropa Barat sebagai benteng melawan Soviet, namun memuncak dalam kudeta CIA di Iran 1953, yang menggulingkan Mohammad Mossadegh demi mengamankan minyak Barat, menabur benih kebencian di Timur Tengah yang masih membara.

Perang merah menjelma dalam Doktrin Pembendungan, yang mendorong Perang Vietnam (1955–1975). Demi menahan komunisme, AS menyeret lebih dari 3 juta nyawa ke kematian, dengan napalm dan Agent Orange menghancurkan desa-desa, merobek kepercayaan global dan meninggalkan luka domestik yang tak sembuh.

Kelaparan hitam mengintai melalui Politik Sanksi Ekonomi, seperti embargo Kuba pasca-Revolusi 1959, yang memicu krisis pangan berkepanjangan, mengubah Havana menjadi kota hantu kelaparan, cermin penggunaan ekonomi sebagai senjata geopolitik yang kejam.

Kematian hijau pucat menari dalam Kebijakan Pandemi Global, yang gagal mengatasi Covid-19 pada 2020–2021. Ketidakberdayaan AS, ditandai dengan respons terlambat,

polarisasi politik, dan penolakan masker serta vaksin di banyak komunitas, merenggut lebih dari 1 juta populasi AS, menyingkap rapuhnya hegemon di hadapan ancaman tak kasat mata.

### *Pilar AS: Retakan di Rumah Tua*

Hegemoni AS ibarat rumah tua di pinggir danau, dulu megah, kini rapuh. Pilar-pilarnya—aliansi militer, senjata nuklir, politik liberal, ekonomi liberal, dan dolar—berderit di bawah beban waktu dan tantangan baru. Aliansi militer—NATO, ANZUS, pakta dengan Jepang dan Korea Selatan, serta AUKUS (2021) yang dirancang menahan Tiongkok di Indo-Pasifik—ibarat pintu berkarat: masih berdiri, tapi goyah. Serangan 9/11 (2001) oleh Al-Qaeda, yang meruntuhkan Menara Kembar dan menewaskan hampir 3.000 orang, menjadi contoh tambahan kerapuhan aliansi ini.

Respons AS, yang melancarkan perang global melawan terorisme, mengungkap ketegangan dengan sekutu NATO; beberapa negara, seperti Prancis dan Jerman, menolak mendukung invasi Irak 2003, memperlihatkan batas solidaritas aliansi dalam menghadapi ancaman transnasional. AUKUS, alih-alih menyatukan, membuat Prancis marah dan Indonesia was-was, seolah melihat bayang destabilisasi. IISS Military Balance (2025) mencatat Australia harus mengeluarkan \$368 miliar hingga 2050 untuk AUKUS, sementara hanya 48% warga NATO percaya AS akan penuh janji pertahanan (RAND, 2023).

Senjata nuklir, seperti jam tua yang berdetak menakutkan, masih jadi tameng, namun mahal dan kian rapuh. SIPRI (2024) melaporkan belanja militer AS \$997 miliar, 37% dari total global, membebani ekonomi hingga utang publik melonjak ke 120% PDB (IMF, 2024). Keputusan Presiden George W. Bush untuk keluar secara unilateral dari Perjanjian Anti-Ballistic Missile (ABM) pada 2002, dengan alasan membangun pertahanan rudal nasional, memicu ketegangan dengan Rusia dan melemahkan keseimbangan strategis, membuka jalan bagi perlombaan senjata pertahanan.

Demikian pula, Presiden Donald Trump memerintahkan penarikan AS dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) pada 2019, menyalahkan pelanggaran Rusia, namun memicu perlombaan senjata baru dengan rudal jarak menengah, meninggalkan Eropa dan Asia rentan. Kegagalan AS menerapkan strategi penangkalan nuklir yang kredibel, terhambat oleh lambatnya modernisasi persenjataan dan ketidakmampuan menandingi kemajuan hipersonik Tiongkok dan Rusia, memperlemah posisinya sebagai penjamin keamanan global.

Politik liberal, yang dulu digaungkan lewat PBB dengan nyanyian demokrasi, kini pudar. AS menutup mata pada pelanggaran sekutu, seperti ketika mendukung monarki Arab Saudi, meski laporan PBB (2019) menuduhnya terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, demi menjaga aliansi strategis dan akses minyak.

AS menginvasi negara lain atas nama kebebasan, seperti Irak pada 2003, dengan dalih menyebarkan demokrasi, yang justru melahirkan kekacauan, kematian ratusan ribu jiwa, dan ketidakstabilan berkepanjangan. Kontradiksi ini mencoreng kredibilitas liberalisme AS, sementara polarisasi domestik, seperti kerusuhan Capitol 2021, memperparah keretakan—hanya 30% warga AS percaya pada pemerintah (Gallup, 2024).

Ekonomi liberal, yang dibangun via WTO, Bank Dunia, dan IMF, bagai kebun yang layu. Globalisasi justru mengangkat Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonomi AS 2,1% tertinggal dari Tiongkok 4,8% (IMF, 2024), ditambah ketimpangan domestik (Gini, 0,41, World Bank 2024). Dolar, mercusuar masa lalu, kini redup.

Loewy Institute (2024) melaporkan penggunaan Yuan dalam perdagangan global naik 12% sejak 2020, menggerus dominasi dolar yang kini hanya 58% transaksi global. Sementara AS merenung, Tiongkok melaju dengan jaringan komputasi kuantum dan infrastruktur digital, menjembatani kesenjangan teknologi di Kelompok Negara Selatan, bukan cuma mengatasi sumbatan maritim di beberapa titik konektivitas strategis seperti Selat Malaka, Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb, dan Selat Gibraltar, yang semuanya vital bagi rantai pasok energi dan perdagangan Tiongkok.

Dengan investasi di 129 pelabuhan di puluhan negara, 17 di antaranya dimiliki mayoritas oleh perusahaan Tiongkok seperti COSCO Shipping dan China Merchants Port Holdings, Tiongkok menguasai pelabuhan strategis dunia seperti Port of Darwin di Australia, Tanjung Priok di Jakarta, Balboa dan Colón di Panama, Doraleh di Djibouti, dan Hambantota di Sri Lanka, menjalin konektivitas global Beijing yang mengikat erat jalur perdagangan dunia.

### *Dari Kemenangan ke Krisis: Akhir Unipolar?*

Di penghujung Perang Dingin, ketika tembok Berlin runtuh pada 1989 dan Uni Soviet ambruk pada 1991, Amerika Serikat berdiri sebagai raksasa tanpa tanding, memegang dunia dalam genggaman dolar dan nyanyian demokrasi. Kemenangan itu, bagai lukisan di dinding kuil, tampak abadi. Namun, seperti segala yang megah, ia rapuh, retak di bawah beban waktu. Apa yang menjulang tinggi kini goyah, bukan karena musuh yang lebih kuat, melainkan karena luka yang ditorehkan sendiri.

Korea (1950–1953) dan Vietnam (1955–1975) menyingkap batas pedang Amerika, menorehkan darah dan keraguan di hati dunia. Krisis Minyak 1973, seperti bisikan dari bumi, memperlihatkan kerapuhan ekonomi yang tersembunyi di balik kilau kemakmuran. Lalu, 9/11 pada 2001, ketika Menara Kembar menjadi puing, menyeret AS ke dalam perang antiteror yang menguras jiwa dan harta, menggoreskan pertanyaan: apakah keamanan bisa dibeli dengan darah?

Krisis Keuangan 2008, bagai badai yang merobohkan mitos pasar keuangan liberal, membuka celah bagi Tiongkok, yang melangkah dengan otoritarianisme pragmatis, menawarkan jembatan dan pelabuhan kepada Kelompok Negara Selatan, tanpa syarat moral Barat.

Di tengah puing-puing kejayaan, polarisasi politik merobek jalinan sosial AS, seperti kain tua yang terkoyak. Ambisi di Irak dan Afghanistan, yang dikira akan menabur demokrasi, justru menumbuhkan duri kekacauan. Perang Dagang (2018–sekarang) dan AUKUS, yang dimaksudkan sebagai tameng, malah memantik kemarahan Prancis dan kecemasan Indonesia, seolah aliansi adalah cermin yang retak. Di sisi lain, Tiongkok menjalin sabuk digital, menguasai mineral strategis seperti litium dan kobalt, yang menjadi darah teknologi masa depan.

Paradoks menjelma: realisme yang membesarkan AS—pedang, dolar, dan aliansi—kini menggerus liberalisme yang pernah digaungkannya. Apakah ini akhir unipolar, ketika satu kekuatan memerintah? Ataukah hanya bayang-bayang, menari di dinding sebelum fajar baru? Sejarah, seperti jam tua, tak pernah menjawab—ia hanya berdetak, menanti retakan berikutnya.

### *Peramal (bukan) Alumni Hogwarts*

Bayangkan seorang peramal berjubah abu-abu, berdiri di persimpangan sejarah, jubahnya compang-camping, tongkatnya patah, namun matanya tajam, melihat bayang-bayang yang tak terbaca orang lain. Ia bukan alumni Hogwarts, tak terlatih dalam

mantra-mantra kuno, melainkan peramal yang lahir dari puing-puing sejarah, meramal dengan skeptisisme dan luka. Para cendekiawan, seperti peramal ini, telah memetakan retakan Amerika, bukan dengan sihir, tetapi dengan pena dan keraguan.

Pada 1976, Robert Jervis dalam “Perception and Misperception in International Politics” membuka tabir tentang kelemahan manusia di balik keputusan besar. Di dunia anarkis yang dingin, kata Jervis, pemimpin bukan mesin rasional; mereka tersandung oleh bayangan persepsi, seperti dalam krisis misil Kuba. Neorealisme defensifnya berbisik: struktur sistem membatasi, tapi pikiran manusia sering kali menipu.

Tiga tahun kemudian, Kenneth Waltz dengan “Theory of International Politics” (1979) meletakkan fondasi yang lebih kokoh. Dunia, baginya, adalah arena anarki di mana negara-negara, seperti pemain catur yang waspada, bergerak untuk bertahan hidup. Keseimbangan kekuasaan, bukan kebaikan hati, adalah hukum tak tertulis. Waltz tak peduli pada ambisi individu; struktur sistem, katanya, adalah penguasa sejati.

Lalu datang Robert Gilpin pada 1981 dengan “War and Change in World Politics” , seolah menyambung nada Waltz namun dengan irama yang lebih kelam. Ia melihat dunia sebagai siklus tanpa akhir: hegemon naik, lalu runtuh, ditantang oleh yang lapar kekuasaan. Perang, baginya, adalah bayang-bayang yang tak bisa dielak ketika keseimbangan terguncang. Gilpin tak sekadar neorealis; ia seperti penyair yang meratapi ketidakabadian kekuasaan.

Di sisi lain, Robert Keohane dalam “After Hegemony” (1984) menawarkan nada yang lebih lembut. Sebagai neoliberal, ia tak sepenuhnya setuju dengan kegelapan neorealisme. Anarki, katanya, tak selalu musuh; institusi bisa menjembatani kerja sama, bahkan ketika hegemon mulai merapuh. Namun, bayang-bayang Gilpin tetap ada dalam argumennya—kekuasaan tak pernah benar-benar absen.

Stephen Walt, di “The Origins of Alliances” (1987), memperhalus nada Waltz dengan teori “keseimbangan ancaman”. Negara-negara, baginya, tak hanya menghitung kekuatan, tapi juga ancaman—kedekatan geografis, niat agresif, seperti dalam aliansi Perang Dingin. Ia seperti pengamat yang duduk di pinggir, mencatat bagaimana ketakutan, bukan sekadar angka, menggerakkan dunia.

Lalu, Francis Fukuyama, dengan “The End of History and the Last Man” (1992), datang seperti seorang pengelana yang percaya cerita dunia telah sampai pada akhir bahagia: demokrasi liberal. Tapi di balik optimismenya, neorealis mendengar nada sumbang. Dunia Waltz tak mengenal akhir; anarki tak pernah pensiun.

Samuel Huntington, dalam “The Clash of Civilizations” (1996), menulis dengan nada yang lebih berat. Dunia pasca-Perang Dingin, baginya, bukan soal kekuasaan semata, melainkan peradaban yang bertabrakan. Meski tak murni neorealis, ia seperti menambahkan warna baru pada kanvas Waltz: konflik tak hanya soal tank dan rudal, tapi juga identitas yang tak bisa didamaikan.

Setahun kemudian, Zbigniew Brzezinski dengan “The Grand Chessboard” (1997) menggambar peta strategi Amerika, seolah dunia adalah papan catur raksasa. Hegemoni AS, katanya, bergantung pada penguasaan Eurasia dan *choke points* strategis. Neorealisme di sini bukan sekadar teori, tapi panduan bagi yang ingin tetap raja.

John J. Mearsheimer, dengan “The Tragedy of Great Power Politics” (2001), membawa nada yang lebih tegas. Berbeda dengan Waltz yang defensif, Mearsheimer ofensif: negara-negara tak hanya ingin bertahan, mereka ingin mendominasi. Dunia baginya adalah

tragedi tanpa akhir, di mana AS dan Tiongkok, seperti aktor di panggung Sophokles, ditakdirkan untuk berselisih.

Lalu, Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam “Why Nations Fail” (2012) mengalihkan pandangan ke dalam. Bukan hanya sistem internasional, tapi institusi domestik—inklusif atau ekstraktif—yang menentukan kekuatan negara. Meski tak murni neorealis, mereka seperti menambahkan catatan pinggir: kekuasaan global dimulai dari fondasi di rumah.

Henry Kissinger, di “World Order” (2014), menulis dengan kebijaksanaan seorang tua yang telah melihat dunia retak dan pulih berkali-kali. Dari Westphalia hingga kini, ia merenungi bagaimana anarki, teknologi, dan ideologi mengguncang tatanan. Neorealisme di sini hadir dalam sorot matanya yang tajam pada keseimbangan kekuasaan, meski dengan sentuhan realisme klasik.

Graham Allison, dalam “Destined for War” (2017), membawa kita ke tepi jurang. Dengan “Thucydides’s Trap”, ia memperingatkan: ketika Tiongkok bangkit dan AS terancam, konflik mengintip di cakrawala. Neorealisme di sini adalah cermin yang memantulkan ketegangan abadi antar kekuatan besar.

Terakhir, Edward Fishman, dengan “Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare” (2025), menulis dari pinggir arena kekuasaan. Sanksi, baginya, adalah senjata baru AS, memanfaatkan dolar untuk menekan Iran, Rusia, Tiongkok. Ia mengkritik Trump yang gegabah dan Obama yang terlalu hati-hati, seolah mencari keseimbangan yang tak pernah sempurna.

Neorealisme hadir menawarkan mantranya: dalam dunia anarkis, kekuasaan ekonomi adalah pedang bermata dua. Para cendekiawan ini tak sekedar menawarkan mantra, mereka juga menawarkan cermin. Cermin itu tidak lagi menunjukkan AS sebagai negara adi daya, namun memantulkan posisi AS yang berada di celah retakan.

### *Retakan Hegemoni*

Di ambang jurang, hegemoni Amerika Serikat mendengar jam tua yang berdetak di bawah bayang empat penunggang kuda: penaklukan putih, perang merah, kelaparan hitam, kematian hijau pucat.

Para peramal berjubah abu-abu telah lama melihat retakan hegemoni. Robert Jervis dan Kenneth Waltz mengungkap kelemahan persepsi dan hukum anarki yang mengatur keseimbangan kekuasaan. Robert Gilpin dan John J. Mearsheimer meratapi siklus hegemoni yang runtuh dan tragedi dominasi AS-Tiongkok. Robert Keohane serta Daron Acemoglu bersama James A. Robinson heran saat AS menanggalkan institusi inklusif yang nyata-nyata menentukan kekuatan.

Graham Allison dan Edward Fishman memperingatkan Jebakan Thucydides dan pedang bermata dua sanksi ekonomi dalam dunia anarkis. Mereka melihat indikasi yang sama, hegemoni retak. Di ujung retakan, samar-samar mereka melihat laju Tiongkok dalam empat bentangan skenario.

Pertama, yang paling menguntungkan AS, jika AS mereformasi institusi, mengurangi polarisasi, memprioritaskan pembangunan manusia, dan menguasai pasokan mineral strategis, sementara Tiongkok tersandung oleh krisis domestik, AS bertahan meski melemah. Fukuyama telah memperingatkan polarisasi yang merobek kebersamaan, Kennedy melihat peluang dalam pengendalian sumber daya, dan Acemoglu menegaskan

bahwa institusi inklusif adalah akar kekuatan, menahan laju penunggang kuda.

Bahkan di bawah bayang proteksionisme Trump, yang memisahkan sekutu dan memangkas PDB 1,3% (Peterson, 2024), reformasi ini bisa merajut kembali kepercayaan global, meski kepercayaan dunia pada AS kini hanya 35% (WEF, 2024). Dengan probabilitas 20%, skenario ini dianggap kecil, sebab luka dalam AS—kepercayaan rakyat yang runtuh, hanya 30% yang percaya pada pemerintah (Gallup, 2024)—dan cengkeraman Tiongkok atas mineral strategis (USGS, 2024) membuat reformasi laksana menjahit kain yang telah koyak. Namun, seperti lukisan yang masih bisa diselamatkan, harapan ini menolak menyerah pada kegelapan.

Lalu, skenario kedua, sedikit kurang menguntungkan, jika AS terperangkap dalam konflik global dan gagal mengamankan mineral strategis, sementara Tiongkok juga terhambat oleh utang atau ketimpangan, dunia memasuki tatanan multipolar tanpa hegemon tunggal. Waltz meramalkan dunia tanpa tuan, Brzezinski memperingatkan kegagalan di papan catur Eurasia, dan Nye menyoroti aliansi yang retak, kini diperparah oleh AUKUS yang memicu kemarahan Prancis dan kecemasan Indonesia, di mana kematian hijau pucat mengintai di tengah kekacauan.

Sanksi AS, seperti yang Fishman catat, mendorong dedolarisasi, dengan 15% perdagangan global non-dolar (RAND, 2023), melemahkan kedua raksasa. Dengan probabilitas 30%, skenario ini lebih mungkin, sebab ketidakstabilan global—konflik Ukraina, gejolak Timur Tengah (WEF, 2024)—dan kelemahan bersama, seperti utang Tiongkok atau polarisasi AS, bagai badai yang merobohkan kedua raksasa. Tetapi, dalam kerapuhan ini, dunia bercermin: adakah harmoni di antara puing-puing?

Kemudian, skenario ketiga, lebih buruk bagi AS, jika Tiongkok melesat dengan AI, teknologi hijau, jaringan kuantum, dan dominasi mineral strategis melalui investasi di Afrika dan Amerika Latin, mereka menjadi hegemon dalam 10–15 tahun, dengan AS merosot ke posisi sekunder, diwarnai perang merah dan kelaparan hitam. Gilpin telah melihat nadi ekonomi bergeser ke timur, Mearsheimer meramalkan sabuk Tiongkok yang menjerat dunia, dan Allison menabuh genderang Jebakan Thucydides, diperparah oleh tarif Trump yang mengasingkan sekutu menuju RCEP, sementara Tiongkok menjulang dengan kepercayaan global 48% (WEF, 2024).

Dengan probabilitas 40%, skenario ini signifikan, didorong oleh keunggulan Tiongkok—pertumbuhan 4,8% melawan 2,1% AS (IMF, 2024)—dan kerentanan AS, dari mineral hingga kohesi sosial, yang Acemoglu sebut sebagai akibat institusi yang gagal beradaptasi. Seperti lukisan yang memudar di bawah matahari baru, AS menyaksikan bayang-bayang hegemoni lain menjulang.

Terakhir, skenario keempat, yang terburuk bagi AS, jika AS terpuruk dalam polarisasi, tarif, dan ketegangan geopolitik, sementara Tiongkok memperluas Sabuk dan Jalan Digital serta menguasai mineral strategis. Tiongkok menggantikan AS dalam 15–20 tahun, ditandai penaklukan putih. Fishman memperingatkan sanksi yang memantik kebangkitan Yuan digital, Kissinger merenungkan tatanan yang berguncang, Walt menelanjangi ilusi demokrasi yang runtuh, dan Acemoglu meramalkan kerapuhan institusi yang mempercepat kejatuhan, kini diperdalam oleh proteksionisme Trump yang memicu inflasi 2% (Peterson, 2024) dan memisahkan sekutu. Dengan probabilitas tertinggi, 50%, skenario ini paling mungkin, didorong oleh polarisasi yang mencabik AS, kebijakan yang memecah aliansi, dan laju Tiongkok yang tak tertandingi dalam pelabuhan dan mineral, menjadikan dunia panggung baru Beijing. Bagai istana yang ambruk di bawah beban sendiri, AS menyerah pada penunggang kuda yang tak terelakkan, sementara Jebakan Thucydides, yang diramalkan Allison, mengintai dengan

risiko konflik 50% dalam 10–15 tahun.

Tanpa perubahan struktural, erosi hegemoni AS tak terelakkan. Empat penunggang kuda—penaklukan putih, perang merah, kelaparan hitam, kematian hijau pucat—akan berlari, menghancurkan apa yang menghalangi. Sejarah tak berpihak; ia berdetak, menanti retakan berikutnya.

**AW**

**Amsterdam, 04.05.2025.**

**Dirgahayu LAB 45.**

---

*Jalan Mabes Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890  
Email: [lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id) | Telpon: +62811452045*

*Silahkan hubungi tim editorial untuk pertanyaan melalui  
[lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id)*